



PEMERINTAH
KOTA BATAM

PERUBAHAN RENCANA KERJA

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BATAM

2024



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 184 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS
KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan berpedoman pada Peraturan Wali Kota Batam Nomor 82 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 242);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan. . .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), sebagaimana telah dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 ((Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BATAM TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.

3. Rencana. . .

3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2024, kondisi lingkungan strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II tahun berjalan.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I. PENDAHULUAN;
 - b. BAB II. HASIL EVALUASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II;
 - c. BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;
 - d. BAB IV. PENUTUP.
- (3) Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan bagian dari Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3. . .

Pasal 3

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target capaian kinerja, dan pagu indikatif.
- (2) Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan RKA Perangkat Daerah.
- (3) Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

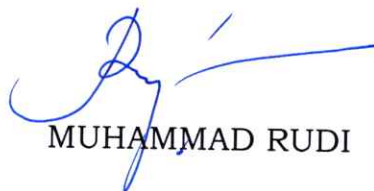
Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar. . .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 5 AGUSTUS 2024

WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 5 AGUSTUS 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2024 NOMOR 1524

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayahnya sehingga Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam Tahun 2024 sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa setiap satuan kerja pemerintahan diwajibkan membuat Rencana Kerja sebagai pedoman kerja setiap satuan kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diembannya dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam Tahun 2024 suatu dokumen perubahan perencanaan program dan kegiatan Tahun 2024. Tujuan disusunnya Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini merupakan suatu dokumen perencanaan program perubahan tahunan dan kegiatan pembangunan yang memberikan arah kebijakan, strategi pembangunan dan program khususnya di bidang Pelaksanaan Pembangunan Ketahanan Pangan, Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Kelembagaan dan Penyuluhan di Kota Batam.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja ini menjadi acuan segenap satuan kerja dilingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam, kami mengharapkan dukungan dari semua pihak, baik dari pemangku kepentingan dan instansi terkait lainnya dalam mensukseskan pembangunan sektor Ketahanan Pangan, Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Kelembagaan dan Penyuluhan. Tugas membangun sektor Ketahanan Pangan, Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Kelembagaan dan Penyuluhan ke depan adalah tugas bersama, bukan merupakan tugas pemerintah semata atau Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam.

Dengan tersusunnya Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 ini, semoga dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Batam, Juli 2024
Kepala Dinas Ketahanan Pangan
dan Pertanian Kota Batam

Mardanis, AMP, SE, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19680714 198811 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB. I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penyusunan	4
BAB. II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024.....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	27
2.3 Isu–isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	28
BAB. III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Program dan Kegiatan	35
BAB. IV PENUTUP	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah, sehingga dengan Undang-undang ini kita mengenal satu bagian penting dari perencanaan daerah yaitu rencana pembangunan daerah, diantaranya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) sebagai kelengkapannya.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam yang mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) menjadi jembatan antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan tahunan. Dokumen ini memuat evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang urusan Ketahanan Pangan dan Pertanian strategi, program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Adapun Keterkaitan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan suatu penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan RKPD. Sedangkan Rancangan Perubahan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon

Anggaran Sementara (PPAS). Sementara itu Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam tahun 2024 disusun dengan tujuan mewujudkan pencapaian Misi Kota Batam yang ke- 3 Yaitu Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia. Adapun sasaran yang akan dicapai yaitu Meningkatnya sektor ketahanan pangan daerah. Ukuran ketercapaian sasaran adalah Skor Pola Pangan Harapan yang meningkat dan stabil dari tahun ke tahun. Sasaran ini merupakan kondisi keenam yang diharapkan terjadi saat Tujuan keempat Pembangunan Kota Batam 2021-2026 tercapai.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 10. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 484/KPTS/RC.020/M/8/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menti Pertanian Nomor 259/KPTS/RC/020/M/05/2020 Tentang Rencana Startegis Kementrian Pertanian Tahun 2020-2024
 14. Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022 – 2024
 15. Peraturan Daerah Kota Batam No 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam 2005-2025;

16. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 67);
17. Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batam Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
18. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7, Nomor Register Peraturan Daerah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau : (7,44/2021))
19. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 6, Nomor Register Peraturan Daerah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau : 6,39/2023);
20. Peraturan Walikota Batam Nomor 219 Tahun 2022 tentang Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam Tahun 2021-2026

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam adalah menyediakan dokumen yang berisi rencana kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam untuk periode 1 (satu) tahun.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam antara lain:

- a) Sebagai koridor pelaksanaan program kerja Dinas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam tahun 2024;
- b) Sebagai bahan acuan penyusunan RKA Perubahan SKPD Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam tahun 2024, meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian
Rencana Strategis Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu –isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Renja Opd Sampai Dengan Triwulan II (Tahun Berjalan)

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Evaluasi terhadap Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam tahun 2024 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Triwulan II 2024 sebagaimana tabel 2.1. dengan uraian penjelasan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Realisasi Kinerja dan Keuangan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam
Triwulan II Tahun 2024

1	2	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGR AM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RKPD 2024	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2023		KETERANG AN
								SATUAN	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10		11		12		13		14
	(ISI KODE)	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN						0		17.713.154.492	-	13.321.776.279		4.613.756.993	13,23	1.639.119.868		0	
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													0,00	0,00			
		URUSAN PEMERINTAHAN N BIDANG PANGAN												4.355.355.561,00	0,00	1.894.315.512,00			
	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN N DAERAH KABUPATEN/K OTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah					%	100	9.933.439.374	100%	9.267.738.226		4.355.355.561	0,00	1.599.516.894	0	17,26	
	2.09.01 .2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi			%	100	9.259.371.624	100%	9.042.577.226		3.650.617.005	17,35	1.569.246.894	17,35	17,35	
	2.09.01 .2.02.0 1					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	48	Rp9.198.911.624,00	48	Rp9.042.577.226	40,37	3.650.617.005,00	17,35	1569246894	36,14583333	17,35397835	
	2.09.01 .2.02.0 3					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaa n dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	Rp60.460.000,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0		

1	2	URUSAN/BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM AM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RKPD 2024	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2023		KETERANGAN
								SATUAN	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10		11		12		13		14
	2.09.01.2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah			%	100	256.117.750	100	67.531.000	25.128.000	0,31	1.050.000	0,3145	1,55		
	2.09.01.2.06.01					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	Rp8.599.000,00	1	3.504.000,00	63,07	2.210.000,00	0,00	0,00	0	0,00	
	2.09.01.2.06.02					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	Rp104.785.750,00	5	37.321.000,00	55,78	20.818.000,00	0,04	1600000	0,858	4,29	
	2.09.01.2.06.05					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	Rp27.113.000,00	1	Rp4.780.000	18,83	900.000,00	0,19	900.000,00	18,83	18,83	
	2.09.01.2.06.06					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	Rp3.600.000,00	2	Rp1.800.000	41,67	750.000,00	0,08	150.000,00	4,165	8,33	
	2.09.01.2.06.09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	Rp112.020.000,00	1	20.126.000,00	2,24	450.000,00	0,00	0,00	0	0,00	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana			%	100	199.180.000	0	0	0	0	0	0	0		

1	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGR AM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RKPD 2024	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2023		KETERANG AN		
								SATUAN	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp.	TW 2		KINERJA	Rp	KINERJA	Rp		KINERJA	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10		11		12		13		14		
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	15	Rp199.180.000,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0					
	2.09.01 2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			%	100	1.657.623.124	100 %	1.311.968.100	0	632.523.356	0,43	294.798.618	0,4317	22,47			
	2.09.01 2.08.0 2					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	Rp238.652.400,00	1	Rp238.652.400	32,55	77.681.262,00	0,20	48.194.448,00	20,19	20,19			
	2.09.01 2.08.0 4					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	Rp1.418.970.724,00	1	Rp1.073.315.700	51,69	554.842.094,00	0,23	246.604.170,00	22,98	22,98			
	2.09.01 2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana			%	100	218.770.000	100	157.630.000		47.087.200	0	29.220.000	0,4317	18,54			
	2.09.01 2.09.0 2					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	3	Rp155.510.000,00	3	Rp150.580.000	28,32	42.637.200,00	0,19	28.860.000,00	6,39	19,17			

1	2	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGR AM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RKPD 2024	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2023		KETERANG AN		
								SATUAN	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp.	TW 2		KINERJA	Rp	KINERJA	Rp		KINERJA	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10		11		12		13		14		
	2.09.01 2.09.0 6					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	20	Rp24.450.000,00	20	5.550.000,00	69,37	3.850.000,00	0,00	0,00	0	0,00			
	2.09.01 2.09.0 9					Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	unit	2	Rp38.810.000,00	2	Rp1.500.000	40,00	600.000,00	0,24	360.000,00	12	24,00			
	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan Energi					kkal perkapita perh	2.608	1.798.771.700	2.608	1.079.333.300	0	0	0	0	0	0,00			
				Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/K ota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Pangan utama Masyarakat (beras) (Kg/kapita/tahu n)			Kg/kapita/tahu	152,6	171.471.100	152,6	83.606.000	0	0	0	0	0	0,00			
						Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Dokumen	1	Rp171.471.100,00	1	83.606.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00			
	2.09.03 2.02			Pengelolaan dan Keseimbanga n Cadangan Pangan Kabupaten/K ota	Persentase penguatan cadangan pangan Pemda (jumlh cad pangan pemda per 100 ton x 100%)			%	40	374.000.000	40	95.330.700	0	0	0	0	0	0,00			

	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGR AM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RKPD 2024	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2023		KETERANG AN
								SATUAN	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10		11		12		13		14
	2.09.03 2.02.0 3					Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/K ota	ton	40	Rp374.000.000,00	40	95.330.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
	2.09.03 2.04			Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tah un sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Cakupan peserta yang mengikuti LCM dan Demo Masak B2SA (kecamatan)			kecamatan	12	1.253.300.600	12 Kecamatan	900.396.600	0	0	0	0	0	0,00	
	2.09.03 2.04.0 2					Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragama n Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaa n Kelompok Masyarakat dalam Penganekara gaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	1	Rp1.253.300.600,00	1	900.396.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase wilayah aman pangan					%	62,5	165.789.600	62.50 %	90.012.000	0	0	0	0	0	0,00	
				Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Persentase dokumen kerawanan pangan yang disusun			%	100	102.001.500	100 %	67.592.000	0	0	0	0	0	0,00	
				-		Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	Dokumen	12	Rp102.001.500,00	12	67.592.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	

1	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGR AM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RKPD 2024	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2023		KETERANG AN		
								SATUAN	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp.	TW 2		KINERJA	Rp	KINERJA	Rp		KINERJA	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10		11		12		13		14		
	2.09.04 2.02			Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/K ota	Persentase wilayah rentan pangan yang ditangani (jumlah kelurahan rentan pangan/jumlah kelurahan x 100%)			%	6,25	63.788.100	6,25	22.420.000	0	0	0	0	0	0,00			
	2.09.04 2.02.0 2					Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/K ota	Dokumen	12	Rp63.788.100,00	12	22.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00			
	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan aman yang dikonsumsi (PSAT)					%	88	95.926.950	88%	55.434.200	0	0	0	0	0	0,00			
	2.09.05 2.01			Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/K ota	Persentase sampel PSAT yang ditindaklanjuti ke Lab (Jumlah sampel yang diuji ke Lab/Jumlah sampel yang diuji x 100%)			%	45	95.926.950	45%	55.434.200	0	0	0	0	0	0,00			
	2.09.05 2.01.0 2					Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/K ota	Dokumen	29	Rp95.926.950,00	29	55.434.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00			
		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													0,00	0,00					

1	2	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGR AM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RKPD 2024	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2023		KETERANG AN		
								SATUAN	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp.	TW 2		KINERJA	Rp	KINERJA	Rp		KINERJA	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10		11		12		13		14		
		URUSAN PEMERINTAHAN N BIDANG PERTANIAN											258.401.432,00	0,00	39.602.974,00						
	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANG AN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan produksi pertanian (komoditas palawija dan hortikultura) Jumlah produksi ternak sapi					% dan ekor	4 dan 95	2.515.330.000	4 % dan 95 ekor	1.879.786.047	0	7.120.000	0	0	0	0,00			
	3.27.02 .2.01			Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah produksi pertanian (komoditas palawija dan hortikultura)			ton	34.947	2.467.094.000	34947 Ton	1.870.166.047	0	0	0	0	0	0,00			
	3.27.02 .2.01.0 2					Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	12	Rp2.467.094.000,00	12	1.870.166.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00			
				Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/K ota	Jumlah Produksi hewan ternak sapi (ekor)			ekor	15	48.236.000	15	9.620.000	0	7.120.000	0	0	0	0,00			
						Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia	Laporan	1	Rp48.236.000,00	1	9.620.000	74,01	7.120.000,00	0,00	0,00	0	0,00			
	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANG AN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah produksi karkas sapi dari RPH (Ton per tahun)					Ton per tahun	266	1.520.328.800	266 ton per tahun	207.576.114	36	73.903.109	0	19.437.302	0,03518797	9,36			

1	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGR AM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RKPD 2024	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2023		KETERANG AN
								SATUAN	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10		11		12		13		14
	3.27.03 2.02			Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah RPH yang dipelihara			Unit	2	1.520.328.800	2 Unit	207.576.114	36	73.903.109	0	19.437.302	4,68	9,36	
	3.27.03 2.02.0 7					Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	Unit	2	Rp1.520.328.800,00	2	Rp207.576.114	35,60	73.903.109,00	0,09	19.437.302,00	4,68	9,36	
	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIA N KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Cakupan lokus atau lokasi surveillance hewan dan produk asal hewan (%)					%	90	1.080.402.068	90 %	741.896.392	0	177.378.323	0	20.165.672	0,077777778	2,72	
	3.27.04 2.01			Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/K ota	Persentase jumlah sampel keswan dan kesmavet yang diuji (jumlah sampel yang diuji / jumlah hewan dan produk asal hewan)			%	90	119.347.968	90	33.680.292	0	0	0	0	0	0,00	
	3.27.04 2.01.0 1					Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	wilayah	6	Rp119.347.968,00	6	33.680.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
	3.27.04 2.03			Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Ko ta	Jumlah frekuensi layanan kesehatan hewan melalui pemeriksaan kesehatan hewan dan pemeriksaan laboratorium kesehatan hewan / produk asal hewan di UPTD, Puskesmas			kali	1200	900.380.100	1200	708.216.100	0	177.378.323	0	20.165.672	0,005833333	2,85	

1	2	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGR AM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RKPD 2024	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2023		KETERANG AN
								SATUAN	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10		11		12		13		14
	3.27.04 2.03.0 1					Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	Laporan	12	Rp500.361.800,00	12	Rp420.058.300	15,76	66.221.500,00	0,00	0,00	0	0,00	
	3.27.04 2.03.0 2					Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan	12	Rp400.018.300,00	12	Rp288.157.800	38,57	111.156.823,00	0,07	20.165.672,00	0,583333333	7,00	
				Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	-			-	-	60.674.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
						Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik	Unit Usaha	15	Rp60.674.000,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
	3.27.07 2.01	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN						%	10	603.166.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.27.07 2.01			Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelompok Tani yang dibina/dikemban gkan			%	80	603.166.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.27.07 2.01.0 1					Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	1	Rp54.475.000,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
	3.27.07 2.01.0 2					Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	12	Rp516.111.000,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2023		KETERANGAN		
								SATUAN	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp.	TW 2		KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10		11		12		13		14		
						Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Unit	15	Rp32.580.000,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0				

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berupa masukan input dana pada Renja tahun 2024 sebesar Rp. 9.933.439.374,- dengan APBD 2024 sebesar Rp. 9.267.738.226,-. Sedangkan Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II Sebesar Rp. 4.355.335.561 (47%). Target Indikator Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan pada APBD 2024 dengan target 100%. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 5 kegiatan, yaitu:

a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja kegiatan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah berupa input dana pada Renja tahun 2024 sebesar Rp. 9.259.371.624 dengan APBD 2024 sebesar Rp. 9.042.577.226,-. Sedangkan Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II Sebesar Rp. 3.650.617.005 (40,37%). Sedangkan Indikator kegiatan adalah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi dengan target 100%. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 2 sub kegiatan.

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN berupa masukan input dana pada Renja tahun 2024 sebesar Rp. 9.198.911.624,00 dengan APBD 2024 sebesar Rp 9.042.577.226,-. Sedangkan Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II Sebesar Rp. 3.650.617.005,00 (40,37%). Sedangkan Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dengan target sebanyak 41 orang/bulan.

2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD.

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD berupa masukan input dana pada Renja tahun 2024 sebesar Rp. 60.460.000 dengan APBD 2024 sebesar Rp 0,-. Sedangkan Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II Sebesar Rp. 0 (0%) dan Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan target sebanyak 0 dokumen.

b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah berupa masukan dana pada Renja tahun 2024 sebesar Rp. 256.117.750 dengan APBD 2024 sebesar Rp 67.531.000,-. Sedangkan Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II Sebesar Rp. 25.128.000 (37,21%) dan Indikator kegiatan adalah Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan target sebesar 100% . Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari 5 sub kegiatan, yaitu:

1. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan berupa masukan input dana pada Renja tahun 2024 sebesar Rp. 3.600.00 dengan APBD 2024 sebesar Rp 1.800.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 750.000,- (41,67%). Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan yang disediakan dengan target 2 Dokumen dan realisasi sebanyak 2 Dokumen.

2. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor berupa masukan input dana pada Renja tahun 2024 sebesar Rp. 8.599.000 dengan APBD 2024 sebesar Rp 3.504.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.210.000,- (63,07%). Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Paket Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan dengan target 1 paket dan realisasi 1 paket.

3. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Indikator, Tolak ukur kinerja dan target kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan berupa masukandana pada tahun 2024 sebesar Rp. 4.780.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 900.000,- (0,19%). Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan dengan target 1 Paket.

4. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor berupa masukan input dana pada Renja tahun 2024 sebesar Rp. 104.785.750,- dengan APBD 2024 sebesar Rp 37.321.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 20.818.000,- (55,78%). Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan dengan target 5 Paket.

5. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD berupa masukan input dana pada Renja tahun 2024 sebesar Rp. 112.020.000,- dengan APBD 2024 sebesar Rp 20.126.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 450.000,- (2,24%). Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan target 12 Laporan .

c. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah berupa masukan input dana pada Renja tahun 2024 sebesar Rp. 1.657.623.124,- dengan APBD 2024 sebesar Rp 1.311.968.100,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 632.523.356,- (0%). Indikator kegiatan adalah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target sebesar 100% dan realisasi sebesar 100%. Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik berupa masukan input dana pada Renja tahun 2024 sebesar Rp. 238.652.400,- dengan APBD 2024 sebesar Rp 238.652.400,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 77.681.262,- (32,55%). Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan dengan target 1 Laporan.

2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor berupa masukan input dana pada Renja tahun 2024 sebesar Rp. 1.418.970.724,- dengan APBD 2024 sebesar Rp 1.073.315.700,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 554.842.094,- (51,69%). Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan dengan target 1 Laporan.

d. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah berupa masukan input dana pada Renja tahun 2024 sebesar Rp. 218.770.000,- dengan APBD 2024 sebesar Rp 157.630.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 47.087.200,-. Indikator kegiatan adalah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana dengan target sebesar 100% dan realisasi sebesar 100%. Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu :

1. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya berupa masukan input dana pada Renja tahun 2024 sebesar Rp. 24.450.000,- dengan APBD 2024 sebesar Rp 5.550.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.850.000,- (69,37%). Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara dengan target 20.

2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan berupa masukan input dana pada Renja tahun 2024 sebesar Rp. 155.510.000,- dengan APBD 2024 sebesar Rp 150.580.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 42.637.200,- (28,32%). Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan dengan target 3..

B. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat berupa masukan input dana pada Renja tahun 2024 sebesar Rp. 1.798.771.700,- dengan APBD 2024 sebesar Rp 1.079.333.300,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 0 (0,00%). Sedangkan Indikator Program adalah Ketersediaan Energi dengan target 2.608 kkal per kapita per hari. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat terdiri dari 3 kegiatan, yaitu :

- a. Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota berupa masukan input dana pada Renja tahun 2024 sebesar Rp. 374.000.000,- dengan APBD 2024 sebesar Rp 95.330.700,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 0 (0,00 %). Indikator kegiatan adalah Persentase penguatan cadangan pangan Pemda dengan target sebanyak 40% . Target Persentase penguatan cadangan pangan dilakukan pengurangan anggaran sehingga jumlah pengadaan cadangan pangan tidak tercapai.
1. Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah berupa masukan input dana pada Renja tahun 2024 sebesar Rp. 374.000.000,- dengan APBD 2024 sebesar Rp 95.330.700,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 0 (0,00 %). Indikator sub kegiatan adalah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan target sebanyak 40.

- b. Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi berupa masukan input dana pada Renja tahun 2024 sebesar Rp. 1.253.300.600,- dengan APBD 2024 sebesar Rp 900.396.600,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.0 (0,00%). Indikator kegiatan adalah Cakupan peserta yang mengikuti LCM dan Demo Masak B2SA (kecamatan) dengan target sebanyak 12 Kecamatan. Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu

1. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal berupa masukan input dana pada Renja tahun 2024 sebesar Rp. 1.253.300.600,- dengan APBD 2024 sebesar Rp 900.396.600,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 0 (0,00%). Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dengan target sebanyak 1 Laporan.

C. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Program Penanganan Kerawanan Pangan berupa masukan input dana pada Renja tahun 2024 sebesar Rp. 165.789.600,- dengan APBD 2024 sebesar Rp 90.012.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.0 (0,00%). Indikator Program ini adalah Persentase wilayah aman pangan dengan target sebanyak 62,5% dan realisasi sebanyak 62,5%. Program ini terdiri dari 1 Kegiatan, yaitu Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota berupa masukan input dana pada Renja tahun 2024 sebesar Rp. 63.788.100,- dengan APBD 2024 sebesar Rp

22.420.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 0 (0,00%). Indikator Kegiatan ini adalah Persentase wilayah rentan pangan yang ditangani dengan target sebanyak 6,25% dan realisasi sebanyak 6,25% Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan, yaitu :

1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota berupa masukan input dana pada Renja tahun 2024 sebesar Rp. 63.788.100,- dengan APBD 2024 sebesar Rp 22.420.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 0 (0,00%). Indikator Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Pengadaan Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan target sebanyak 1 Dokumen.

D. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Program Pengawasan Keamanan Pangan berupa masukan input dana pada Renja tahun 2024 sebesar Rp. 95.926.950,- dengan APBD 2024 sebesar Rp 55.434.200,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,- (0,00%). Sedangkan Indikator adalah Persentase pangan aman yang dikonsumsi (PSAT) dengan target sebesar 88% dan Realisasi Sebesar 88 %. Program ini terdiri dari 1 Kegiatan, yaitu :

- a. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota berupa masukan input dana pada Renja tahun 2024 sebesar Rp. 95.926.950,- dengan APBD 2024 sebesar Rp 55.434.200,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 0 (0,00%). Indikator Kegiatan ini adalah Persentase sampel PSAT yang ditindaklanjuti ke Laboratorium dengan target sebanyak 45% dan realisasi sebanyak 45 %. Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan, yaitu :
 1. Sub Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Sub Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota berupa masukan input dana pada Renja tahun 2024 sebesar Rp. 95.926.950,- dengan APBD 2024 sebesar Rp 55.434.200,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 0 (0,00%) Indikator Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota dengan target sebanyak 29 Dokumen.

E. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian berupa masukan input dana pada Renja tahun 2024 sebesar Rp. 2.515.330.000,- dengan APBD 2024 sebesar Rp 1.879.786.047,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.120.000 (0,00%). Indikator Program ini terdapat 2 indikator antara lain adalah 1) Persentase peningkatan produksi pertanian (komoditas palawija dan hortikultura) dan . Jumlah produksi ternak sapi sebanyak dengan target sebanyak 4% dan 95 ekor sedangkan. Program ini terdiri dari 1 Kegiatan Yaitu:

- a. Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian berupa masukan input dana pada Renja tahun 2024 sebesar Rp. 2.467.094.000,- dengan APBD 2024 sebesar Rp

1.870.166.047,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.0 (0,00%). Indikator Kegiatan ini adalah Jumlah produksi pertanian (komoditas palawija dan hortikultura) dengan target sebanyak 34.947 Ton dan realisasi sebanyak 34.947 Ton . Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan, yaitu

1. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian berupa masukan input dana pada Renja tahun 2024 sebesar Rp. 2.467.094.000,- dengan APBD 2024 sebesar Rp 1.870.166.047,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 0 (0,00%). Indikator Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian dengan target sebanyak 12 Laporan.

F. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian berupa masukan input dana pada Renja tahun 2024 sebesar Rp. 1.520.328.800,- dengan APBD 2024 sebesar Rp 207.576.114,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 73.903.109,- (36%). Sedangkan Indikator adalah Jumlah produksi karkas sapi dari RPH (Ton per tahun) dengan target sebesar 266 ton . Tak tercapai target indikator karena Sejak merebaknya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di beberapa wilayah Indonesia dan Merujuk Surat Edaran Menteri Pertanian Nomor : 01/SE/PK.300/M/5/2022 tanggal 10 Mei 2022 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada ternak dimana pada bagian E poin 2d yang berbunyi “Melakukan pelarangan pengeluaran dan/atau pemasukan hewan, produk hewan, dan /atau media yang dimungkinkan membawa PMK dari daerah tertular dan/atau terduga ke daerah bebas. Sehingga pulau Batam terjadi kelangkaan ternak potong yang selama ini dipasok dari pulau Sumatera, hal tersebut menyebabkan menurun drastisnya pemotongan di RPH. Pemotongan hanya sebatas ternak lokal yang ada dan tentunya tidak bisa memenuhi kebutuhan pasar kota Batam. Program ini terdiri dari 1 Kegiatan, yaitu :

a. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian berupa masukan input dana pada Renja tahun 2024 sebesar Rp. 1.520.328.800,- dengan APBD 2024 sebesar Rp 207.576.114,- dan realisasi keuangan

sebesar Rp. 73.903.109,- (36%). Indikator Kegiatan ini adalah Jumlah RPH yang dipelihara Target sebanyak 2 Unit. Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan, yaitu :

1. Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan berupa masukan input dana pada Renja tahun 2024 sebesar Rp. 1.520.328.800,- dengan APBD 2024 sebesar Rp 207.576.114,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 73.903.109,- (35,60%). Indikator Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun Direhabilitasi dan Dipelihara serta beroperasi dengan target sebanyak 2 Unit dan realisasi sebanyak 2 Unit. Tak tercapai Target Indikator karena Gedung pemotongan hewan atau rumah potong unggas, dibangun tahun 2014, tetap dilakukan pemeliharaan tetapi belum beroperasi terkait belum memadai peralatan yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa dan belum ada ketersediaan sumber daya manusia.

G. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target Kinerja Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner berupa masukan input dana pada Renja tahun 2024 sebesar Rp. 1.080.402.068,- dengan APBD 2024 sebesar Rp 741.896.392,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 177.378.323,- (0,00%). Indikator Program ini adalah Cakupan lokus atau lokasi surveillance hewan dan produk asal hewan (%) dengan target sebanyak 90% dan realisasi sebanyak 90%. Program ini terdiri dari 2 Kegiatan, yaitu :

1. Kegiatan Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Kegiatan Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan berupa masukan input dana pada Renja tahun 2024 sebesar Rp. 119.347.968,- dengan APBD 2024 sebesar Rp 33.680.292,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.0 (0,00%). Indikator Kegiatan ini adalah Persentase jumlah sampel keswan dan kesmavet yang diuji dengan target sebanyak 90% dan realisasi sebanyak 90%. Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan, yaitu :

1. Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis berupa masukan input dana pada

Renja tahun 2024 sebesar Rp. 119.347.968,- dengan APBD 2024 sebesar Rp 33.680.292,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.0 (0,00%). Indikator Sub Kegiatan ini adalah Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan dengan target sebanyak 6 wilayah.

2. Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota berupa masukan input dana pada Renja tahun 2024 sebesar Rp. 900.380.100,- dengan APBD 2024 sebesar Rp 708.216.100,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 177.378.323 (0,00%). Indikator Kegiatan ini adalah Jumlah frekuensi layanan kesehatan hewan melalui pemeriksaan kesehatan hewan dan pemeriksaan laboratorium kesehatan hewan / produk asal hewan di UPTD. Puskesmas dengan target sebanyak 1200 kali dan realisasi sebanyak 1200 kali Kegiatan ini terdiri dari 2 Sub Kegiatan, yaitu :

1. Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium berupa masukan input dana pada Renja tahun 2024 sebesar Rp. 500.361.800,- dengan APBD 2024 sebesar Rp 420.058.300,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 66.221.500,- (15,76 %). Indikator Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Pelayanan Pelayanan Jasa Laboratorium dengan target sebanyak 1 Laporan.

2. Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner berupa masukan input dana pada Renja tahun 2024 sebesar Rp. 400.018.300,- dengan APBD 2024 sebesar Rp 288.157.800,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 111.156.823,- (38,57%). Indikator Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Pelayanan Pelayanan Jasa Medik Veteriner dengan target sebanyak 1 Laporan.

H. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Program Penyuluhan Pertanian berupa masukan input dana pada Renja tahun 2024 sebesar Rp. 603.166.000,- dengan APBD

2024 sebesar Rp 0,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,- (0,00). Program Penyuluh Pertanian terdiri dari 1 kegiatan yaitu :

1. Pelaksanaan Penyuluh Pertanian

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian berupa masukan input dana pada Renja tahun 2024 sebesar Rp. 603.166.000,- dengan APBD 2024 sebesar Rp 0 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 0 (0,00%). Pelaksanaan Penyuluh Pertanian terdiri dari 2 Sub kegiatan yaitu :

1. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan desa

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian berupa masukan input dana pada Renja tahun 2024 sebesar Rp. 516.111.000,- dengan APBD 2024 sebesar Rp 0 .

2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian berupa masukan input dana pada Renja tahun 2024 sebesar Rp. 54.475.000,- dengan APBD 2024 sebesar Rp 0

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru yang dibentuk pada Tahun 2016 sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor : 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor : 10 Tahun 2016 Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah sedangkan Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam tertuang dalam Peraturan Walikota Batam Nomor : 10 Tahun 2022.

Secara umum kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam dalam melaksanakan tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang ketahanan pangan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan serta kelembagaan dan penyuluh. Dukungan dari seluruh aparatur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam terhadap program sangat besar, dan partisipasi dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Program dan kegiatan dibuat melalui proses perencanaan yang terkoordinir dan mengikuti prosedur berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku atau mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Peraturan Menteri

dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1	1
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)			87.2	87.6	87.9	88.2	91.5	90.5	87.9	88.2	
2	Peningkatan Persentase Pangan Segar Aman Konsumsi			86.0	87.0	88.0	89.0	80.0	100	88.0	89.0	
3	Ketersediaan Pangan Utama (kg / kapita / tahun)			152.2	152.4	152.6	152.8	152.2	154.52	152.6	152.8	
4	Persentase peningkatan produksi pertanian (komoditas palawija dan hortikultura)			3.5	4.0	4.0	4.0	3.5	3.8	4.0	4.0	
5	Persentase peningkatan produksi ternak sapi			16	21	18	22	16.0	22	18	22	
6	Persentase hewan yang sehat dan produk asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal (persentase hasil lab negative ditambah persentase lokus yang terealisasi dibagi dua)			80	85	90	95	80.0	85	90	95	

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu strategis yang dihadapi di Indonesia juga terjadi di Kota Batam, sehingga diperlukan upaya-upaya guna mengamankan produksi dan meningkatkan stok pangan. Isu-isu strategis tersebut antara lain laju pertumbuhan penduduk yang masih tinggi, legalitas lahan pertanian, regulasi/kelembagaan, terbatasnya infrastruktur pertanian serta pola pangan penduduk yang tergantung pada beras. Tidak sebandingnya hasil produksi pertanian dan peternakan dengan jumlah penduduk Kota Batam sehingga diperlukan peningkatan hasil pertanian dan peternakan dengan cara mengoptimalkan lahan yang sudah ada (Intensifikasi Pertanian) dan meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperluas lahan pertanian dan peternakan yang sebelumnya di manfaatkan sebagai lahan pertanian (Ekstensifikasi Pertanian).

Untuk melakukan intensifikasi pertanian dan peternakan perlu dilakukan penguatan kelompok petani dan peternak yang dilakukan oleh tenaga penyuluh pertanian melalui pembinaan dan sosialisasi tentang teknologi budidaya pertanian dan peternakan, serta pemberian bantuan berupa sarana dan prasarana pertanian dan peternakan. Ekstensifikasi Pertanian perlu melakukan pemusatan kawasan lahan pertanian dan peternakan terpadu.

Adapun permasalahan yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam, adalah sebagai berikut :

1. Bidang Ketahanan Pangan
 - a) Program ketahanan pangan nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang belum terintegrasi dengan baik.
 - b) Belum terbentuknya Dewan Ketahanan Pangan Kota Batam sebagai wadah koordinasi OPD dalam penyelenggaraan ketahanan pangan.
 - c) Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi pangan yang menghambat akses fisik dan memicu kenaikan harga.
 - d) Ketersediaan Pangan , antar waktu dan antar wilayah tidak merata.
 - e) Sistem cadangan dan distribusi serta rantai pasokan dan logistik nasional yang belum efisien,
 - f) Belum optimalnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA).
 - g) Masih beredarnya produk pangan yang tidak aman untuk dikonsumsi.
 - h) hasil produksi pangan belum sebanding dengan laju pertumbuhan penduduk

- i) Masih kurangnya kompetensi sumber daya manusia yang menangani kegiatan ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi panganekaragaman pangan dan keamanan pangan.

2. Bidang Kelembagaan dan Penyuluh

- a) Kurangnya SDM Penyuluh lapangan untuk pertanian dan peternakan
- b) Terbatasnya sarana pendukung sistem penyuluhan,
- c) Keterbatasan pengetahuan dan penguasaan teknologi oleh petani
- d) Rendahnya pengetahuan/ pemahaman petani dan peternak tentang budidaya tanaman
- e) Lambatnya dalam pendistribusian pupuk ke lokasi sentra produksi.

3. Bidang Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan:

- a) Ketidakpastian status lahan yang dikelola terutama di kawasan Bonded Area.
- b) Rendahnya kualitas produksi yang dihasilkan karena teknologi, penanganan pasca panen dan pengolahan hasil masih belum optimal.
- c) Status lahan yang belum jelas untuk pengembangan budidaya pertanian/ peternakan sangat berpengaruh terhadap penataan usaha pertanian / peternakan.
- d) Belum maksimalnya pelayanan dan pengelolaan Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan), Rumah Potong Unggas (RPU) dan Rumah Potong Hewan (RPH).
- e) Belum maksimalnya pengawasan Pertanian dan Peternakan.
- f) Masih Kurangnya SDM petugas Pertanian dan Peternakan.
- g) Masih kurangnya pemanfaatan pulau-pulau / wilayah pesisir Kota.
- h) Batam sebagai diversifikasi usaha peternakan.

Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah sebagai berikut :

1. Bidang Ketahanan Pangan

Ketersediaan pangan merupakan aspek penting dalam mewujudkan ketahanan pangan. Penyediaan pangan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan secara berkelanjutan. Untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan meningkatkan kuantitas serta kualitas konsumsi pangan, diperlukan target pencapaian angka ketersediaan pangan per kapita per tahun sesuai dengan angka kecukupan gizinya. Dalam melakukan penilaian terhadap konsumsi energi dan protein secara agregat, digunakan standar/Angka Kecukupan Gizi (AKG) hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG). Salah satu indikator untuk mengetahui pencapaian konsumsi pangan secara kualitatif adalah melalui pencapaian skor PPH,

konsumsi pangan yang ideal digambarkan dengan pencapaian skor PPH 100. Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi X tahun 2012 yaitu merekomendasikan pencapaian target skor PPH sebesar 95 menjadi target capaian tahun 2025 yang sebelumnya (sesuai Perpres 22 tahun 2009) dijadikan target capaian tahun 2015. Capaian keberhasilan Skor PPH Konsumsi tahun 2023 yaitu sebesar 91,5 dari target 87,2.

Secara kuantitas konsumsi pangan penduduk pada tahun 2022 di tingkat rumah tangga (menurut SUSENAS tahun 2020) dengan aplikasi baru yaitu Harmonisasi Analisis PPH Berdasarkan Data Susenas yang digunakan untuk AKE 2150 Kkal/Kap/hari. Kualitas konsumsi pangan penduduk (berdasarkan nilai skor PPH pada tahun 2023 sebesar 91,5 Kondisi aktual di Kota Batam tersebut di atas menunjukkan bahwa ketersediaan energi dan protein secara umum sudah cukup baik. Kelebihan ketersediaan pangan di Kota Batam dapat dimanfaatkan sebagai stok atau cadangan maupun untuk diekspor.

2. Bidang Kelembagaan dan Penyuluh

Sektor pertanian memegang peranan penting dalam pembangunan perekonomian nasional dan bahkan dalam era reformasi diharapkan untuk berperan di garis depan dalam mengatasi krisis ekonomi. Secara intern sebagian terbesar petani Indonesia masih petani subsistem dengan segala keterbatasan mereka, khususnya dalam bidang penguasaan teknologi pertanian yang modern. Secara ektern sektor pertanian Indonesia kurang mendapat perhatian pemerintah dalam pengembangannya secara menyeluruh apabila dibandingkan dengan perhatian pemerintah kepada sektor industri.

Dalam era baru pertanian, penyuluh lapangan harus dituntut untuk memiliki fungsi paling tidak dalam tiga hal yaitu transfer teknologi (technology transfer), fasilitasi (facilitation) dan penasehat (advisory work). Untuk mendukung fungsi-fungsi tersebut, penyuluh pertanian lapangan juga harus menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Kelembagaan penyuluh pertanian mempunyai peranan strategis dalam membangun pertanian khususnya dalam mengembangkan kompetensi pelaku utama dan pelaku usaha di bidang pertanian. Melalui peran penyuluh diharapkan masyarakat pertanian sebagai pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi, teknologi dan sumber daya yang dimiliki sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraan. Sehingga dapat terwujudnya sistem pelatihan pertanian yang kredibel yang berbasis sistem manajemen mutu sesuai kebutuhan petani sehingga memiliki daya saing tinggi.

3. Bidang Pertanian

Hortikultura memegang peran penting dan strategis karena perannya sebagai komponen utama penunjang kebutuhan Pangan Nasional. Komoditas hortikultura khususnya sayuran dan buah-buahan memegang bagian terpenting dari keseimbangan pangan yang dikonsumsi masyarakat, sehingga harus tersedia setiap saat dalam jumlah yang cukup, mutu yang baik, aman konsumsi, harga yang terjangkau, serta dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat sebagai konsumen produk hortikultura yang dihasilkan petani, merupakan pasar yang sangat potensial, dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan kebutuhan yang semakin meningkat dalam jumlah dan persyaratan mutu yang diinginkan.

Komoditas hortikultura juga mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, sehingga usaha agribisnis hortikultura (buah, sayur, tanaman hias dan tanaman biofarmaka) dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat dan petani baik berskala kecil, menengah maupun besar, karena memiliki keunggulan berupa nilai jual yang tinggi, keragaman jenis, ketersediaan sumberdaya lahan dan teknologi, serta potensi serapan pasar di dalam negeri dan internasional yang terus meningkat. Pasokan produk hortikultura nasional diarahkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dalam negeri, baik melalui pasar tradisional, pasar modern, maupun pasar luar negeri (ekspor). Usaha agribisnis hortikultura (buah-buahan, sayuran, tanaman hias dan tanaman biofarmaka) merupakan sumber pendapatan dan sebagai mata pencaharian bagi masyarakat petani skala kecil, menengah dan besar dengan keunggulan berupa nilai jualnya yang tinggi dan jenisnya yang beragam. Produk hortikultura dalam negeri saat ini telah mampu memasok kebutuhan konsumen dalam negeri melalui pasar tradisional dan pasar modern serta pasar luar negeri. Ketersediaan sumberdaya hayati yang berupa jenis tanaman dan varietas yang banyak dan ketersediaan sumberdaya lahan, apabila dikelola secara optimal akan menjadi sumber kegiatan usaha ekonomi yang bermanfaat untuk penanggulangan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja di pedesaan. Kondisi ini ternyata belum dimanfaatkan secara optimal untuk memperkuat pembangunan subsektor hortikultura.

Untuk mencapai apa yang telah diprogramkan perlu adanya langkah –langkah:

- a) Melakukan penguatan modal usaha pertanian.
- b) Melakukan pembinaan dan pelatihan teknis.
- c) Meningkatkan sarana produksi Pertanian
- d) Melakukan pengawasan hasil produk pertanian
- e) Meningkatkan perluasan areal usaha tani
- f) Meningkatkan kualitas hasil pertanian

4. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Dalam upaya mengurangi kesenjangan antara kemampuan produksi lokal Kota Batam dengan kebutuhan pangan asal ternak sesuai norma gizi, maka diharapkan adanya peningkatan produksi, terutama untuk daging sapi dan telur untuk mengimbangi angka kebutuhan konsumsi daging dan telur yang meningkat seiring dengan pertambahan penduduk Kota Batam. Untuk meningkatkan produksi ternak harus juga didukung oleh peningkatan sarana prasarana produksinya maupun sarana prasarana pelayanan yang mendukung terhadap peningkatan produksi.

Disamping itu secara fisik, pangan asal hewan harus memenuhi kriteria layak dan aman untuk dikonsumsi, namun secara mikrobiologis pun harus terjamin keamanannya, yaitu melalui pendekatan indikator kandungan mikroba maksimal dan ada tidaknya residu antibiotik pada bahan pangan tersebut.

Pelaku usaha pengolahan hasil peternakan diharapkan dapat difasilitasi baik sarana prasarana produksinya, pemasarannya maupun pembinaan teknisnya, sehingga kualitas dan kuantitas produk olahan meningkat. Diharapkan juga adanya penambahan jenis produk olahan peternakan andalan yang secara signifikan dapat meningkatkan nilai tambah produk dan meningkatkan pendapatan peternak.

Untuk mendukung kelancaran tata niaga ternak perlu didukung oleh tersedianya sarana pasar produksi ternak (pasar ternak) yang memadai. Tersedianya Rumah Potong Hewan (RPH) yang representatif 1 (unit) pada tahun 2012 untuk menunjang keamanan pangan asal ternak yang memenuhi azas Aman, Utuh, Sehat dan Halal (ASUH) dan pembangunan Rumah Potong Unggas (RPU) di sekitar pasar-pasar tradisional (pasar basah) di Kota Batam. Pada tahun 2024 diharapkan terjadi peningkatan sarana prasarana untuk meningkatkan produksi peternakan harus didukung dengan kegiatan masing-masing seksi sebagai berikut :

- a. Pembibitan dan Produksi Ternak, dengan kegiatan :
 1. Pembibitan dan perawatan ternak
 2. Pengembangan usaha peternakan
 3. Penanganan dan pengamanan ternak bantuan pemerintah
 4. Pengembangan kemitraan usaha peternakan
 5. Pembangunan sarana prasarana pembibitan ternak dan HMT
 6. Penyelamatan sapi betina produktif
 7. Optimalisasi Inseminasi Buatan.

8. Pembangunan sarana penampungan dan pengolahan Biogas.
- b. Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat, dengan kegiatan :
 1. Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak dan hewan peliharaan
 2. Pengembangan dan peningkatan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner
 3. Peningkatan pelayanan Puskesmas
 4. Pembangunan Rumah Potong Hewan
 5. Pembangunan Rumah Potong Unggas
- c. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, dengan kegiatan:
 - 1) Pengembangan produk olahan asal ternak
 - 2) Pengembangan dan peningkatan sistem informasi pasar peternakan
 - 3) Pengadaan pasar ternak
 - 4) Pembangunan sarana prasarana pasar produksi hasil peternakan
 - 5) Peningkatan sarana prasarana kios daging dipasar tradisional.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Kualitas tatakelola pemerintahan (*good governance*) adalah prasyarat tercapainya sasaran pembangunan daerah, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat, serta peningkatan kapasitas birokrasi melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Hal ini sejalan dengan salah satu prioritas pembangunan pemerintah saat ini yakni mewujudkan “*Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya*”.

Untuk mencapai sasaran pembangunan daerah di bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian, sesuai indikator sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam menyusun Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 yang mana program dan kegiatan yang dirumuskan diarahkan untuk mewujudkan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021 – 2026, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 dan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam tahun 2021 – 2026. Rumusan Rancangan APerubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2024 sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Dana yang dialokasikan pada Renja 2024 Perubahan adalah sebesar Rp 9.760.248.885,00,- dengan Indikator Kegiatan Persentase Administrasi

Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi dengan target 100%. Adapun kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terdiri dari 2 sub kegiatan:

i. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Dana yang dialokasikan pada Renja 2024 Perubahan adalah sebesar Rp 9.760.248.885,00,- dengan Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dengan target 51 Orang/bulan.

b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Dana yang dialokasikan pada Renja 2024 Perubahan adalah sebesar Rp. 67.531.000,00,- dengan Indikator Kegiatan adalah Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar 100 %. Adapun Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. yang terdiri dari 5 sub kegiatan;

i. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

Dana yang dialokasikan pada Renja 2024 Perubahan adalah sebesar Rp 3.504.000,00,- dengan Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan dengan target 1 Paket.

ii. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Dana yang dialokasikan pada Renja 2024 Perubahan adalah sebesar Rp. 37.321.000,00,- dengan Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan sebesar 5 Paket.

iii. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

Dana yang dialokasikan pada Renja 2024 Perubahan adalah sebesar Rp. 4.780.000,00,- dengan Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan sebesar 1 Paket.

iv. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

Dana yang dialokasikan pada Renja 2024 Perubahan adalah sebesar Rp 1.800.000,00 dengan Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan sebesar 2 Dokumen.

v. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

.

Dana yang dialokasikan pada Renja 2024 Perubahan adalah sebesar Rp. 20.126.000,00,- dengan Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar 1 laporan.

c. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Dana yang dialokasikan pada Renja 2024 Perubahan adalah sebesar Rp. 1.233.968.100,00 dengan Indikator Kegiatan adalah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target 100%. Adapun kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Daerah terdiri dari 2 sub kegiatan;

i. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Dana yang dialokasikan pada Renja 2024 Perubahan adalah sebesar Rp. 238.652.400,00,- dengan Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan dengan target 1 Laporan.

ii. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Dana yang dialokasikan pada Renja 2024 Perubahan adalah sebesar Rp. 995.315.700,00,- dengan Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan dengan target 1 laporan.

d. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Dana yang dialokasikan pada Renja 2023 Perubahan adalah sebesar Rp157.630.000,00,- dengan Indikator Kegiatan adalah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana dengan target 100%. Adapun Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 3 sub kegiatan;

i. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

Dana yang dialokasikan pada Renja 2024 Perubahan adalah sebesar Rp. 150.580.000,00,- dengan Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya dengan target 3 unit.

ii. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Dana yang dialokasikan pada Renja 2024 Perubahan adalah sebesar Rp. 5.550.000,00,- dengan Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara dengan target 20 Unit.

iii. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Dana yang dialokasikan pada Renja 2024 Perubahan adalah sebesar Rp. 1.500.000,00,- dengan Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi dengan target 2 Unit.

B. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

- a. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

Dana yang dialokasikan pada Renja 2024 Perubahan adalah sebesar Rp. 83.606.000,00,- dengan indikator kegiatan Jumlah Pangan utama Masyarakat (beras) (Kg/kapita/tahun) dengan target 152.6 Kg/kapita/tahun Adapun Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan terdiri dari 1 sub kegiatan:

- i. Sub Kegiatan Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)

Dana yang dialokasikan pada Renja 2024 Perubahan adalah sebesar Rp. 83.606.000,00,- dengan indikator Sub kegiatan Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) 1 Dokumen.

- b. Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Dana yang dialokasikan pada Renja 2024 Perubahan adalah sebesar Rp 95.330.700,00,- dengan indikator kegiatan Persentase penguatan cadangan pangan Pemda Target 40%. Adapun kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota terdiri dari 1 sub kegiatan:

- i. Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Dana yang dialokasikan pada Renja 2024 Perubahan adalah sebesar Rp 95.330.700,00,- dengan Indikator kegiatan Jumlah

Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan target 5.6 Ton.

- . c. Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

Dana yang dialokasikan pada Renja 2024 Perubahan adalah sebesar Rp 900.396.600,00,- dengan indikator kegiatan Cakupan peserta yang mengikuti LCM dan Demo Masak B2SA (kecamatan) dengan target 12 Kecamatan. Adapun kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota terdiri dari 1 sub kegiatan:

- i. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Dana yang dialokasikan pada Renja 2024 Perubahan adalah sebesar Rp 900.396.600,00,- dengan Indikator kegiatan Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya lokal dengan target 1 laporan.

C. Program Penangan Kerawanan Pangan.

- a. Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota.

Dana yang dialokasikan pada Renja 2024 Perubahan adalah sebesar Rp 22.420.000,00,- dengan indikator kegiatan Persentase wilayah rentan pangan yang ditangani dengan target 6.25%. Adapun kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota terdiri dari 1 sub kegiatan:

- i. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Dana yang dialokasikan pada Renja 2023 Perubahan adalah sebesar Rp 22.420.000,00,- dengan indikator kegiatan Jumlah Pengadaan Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada

Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah dengan target 12 Dokumen.

b. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan.

Dana yang dialokasikan pada Renja 2024 Perubahan adalah sebesar Rp 67.592.000,0,- dengan indikator kegiatan Persentase dokumen kerawanan pangan yang disusun target 100%. Adapun kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan dari 1 sub kegiatan:

i. Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan.

Dana yang dialokasikan pada Renja 2024 Perubahan adalah sebesar Rp 67.592.000,00,- dengan indikator kegiatan Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan dengan target 12 Dokumen.

D. Program Pengawasan Keamanan Pangan.

a. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota.

Dana yang dialokasikan pada Renja 2024 Perubahan adalah sebesar Rp 55.434.200,00,- dengan Indikator kegiatan Persentase sampel PSAT yang ditindaklanjuti ke Lab (Jumlah sampel yang diuji ke Lab/jumlah sampel yang dengan target 45%. Adapun Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 1 sub kegiatan

E. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian.

a. Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian.

Dana yang dialokasikan pada Renja 2024 Perubahan adalah sebesar Rp 1.999.046.047,00,- dengan indikator kegiatan Jumlah produksi pertanian (komoditas palawija dan hortikultura) dengan target 34.947 Ton. Adapun Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian terdiri dari 1 sub kegiatan:

- i. Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian.

Dana yang dialokasikan pada Renja 2024 Perubahan adalah sebesar Rp. 1.999.046.047,00,- dengan indikator kegiatan Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian dengan target 12 Laporan.

- .b. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Dana yang dialokasikan pada Renja 2024 Perubahan adalah sebesar Rp 9.620.000,00,- dengan indikator kegiatan Jumlah Jumlah Produksi hewan ternak sapi (ekor) dengan target 15 Ekor. Adapun Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 1 sub kegiatan:

- i. Sub Kegiatan Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak.

Dana yang dialokasikan pada Renja 2024 Perubahan adalah sebesar Rp. 9.620.000,00,- dengan indikator kegiatan Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dengan target 1 Laporan.

F. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian.

- a. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian.

Dana yang dialokasikan pada Renja 2024 Perubahan adalah sebesar Rp 207.576.114,00,- dengan indikator kegiatan Jumlah RPH yang dipelihara dengan target 2 unit.

Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian terdiri dari 1 sub kegiatan;

- i. Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan.

Dana yang dialokasikan pada Renja 2024 Perubahan adalah sebesar Rp 207.576.114,00,- dengan Indikator Kegiatan Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun Direhabilitasi dan Dipelihara dengan target 2 Unit.

G. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

- a. Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Dana yang dialokasikan pada Renja 2024 Perubahan adalah sebesar Rp 33.680.292,00,-. dengan indikator kegiatan Persentase jumlah sampel keswan dan kesmavet yang diuji dengan target 90%. Adapun kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota dari 1 sub kegiatan;

- i. Sub Kegiatan Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan.

Dana yang dialokasikan pada Renja 2024 Perubahan adalah sebesar Rp. 33.680.292,00,- dengan indikator kegiatan Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan dengan target 6 Wilayah.

- b. Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Dana yang dialokasikan pada Renja 2024 Perubahan adalah sebesar Rp 708.216.100,00,- dengan indikator kegiatan Jumlah frekuensi layanan kesehatan hewan melalui pemeriksaan kesehatan hewan dan pemeriksaan laboratorium kesehatan hewan / produk asal hewan di UPTD Puskesmas dengan target 1200 kali. Adapun kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 2 sub kegiatan;

- i. Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium.

Dana yang dialokasikan pada Renja 2024 Perubahan adalah sebesar Rp 420.058.300,00,- dengan indikator kegiatan Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium dengan target 12 laporan.

- ii. Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner.

Dana yang dialokasikan pada Renja 2024 Perubahan adalah sebesar Rp 288.157.800,00,- dengan indikator kegiatan Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner dengan target 12 laporan.

H. Program Penyuluh Pertanian.

- a. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.

Dana yang dialokasikan pada Renja 2023 Perubahan adalah sebesar Rp 272.690.000,00,- dengan indikator kegiatan Persentase Kelompok Tani yang dibina/dikembangkan dengan target 80%. Adapun kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian dari 2 sub kegiatan;

- i. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan

Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa.

Dana yang dialokasikan pada Renja 2024 Perubahan adalah sebesar Rp 272.690.000,00,- dengan indikator kegiatan Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya dengan target 200 Unit.

RANCANGAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BATAM
TAHUN 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN							19.370.777.616,00	15.641.830.789,00	15.702.020.861,00							23.984.081.496,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							13.651.550.748,00	12.389.763.984,00	12.471.192.308,00							14.123.191.497,00	
	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							13.651.550.748,00	12.389.763.984,00	12.471.192.308,00							14.123.191.497,00	
144	2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah				100 %	100 %	11.591.062.498,00	11.067.006.684,00	11.246.412.808,00							12.353.399.711,00	
	2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	-			100 %	100 %	9.259.371.624,00	9.458.052.206,00	9.778.404.964,00			-	-	-		9.747.726.270,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				48 Orang/bulan	51 Orang/bulan	9.198.911.624,00	9.458.052.206,00	9.778.404.964,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan	-	-			9.741.647.331,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	2	09	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	60.460.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			6.078.939,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	256.117.750,00	96.505.750,00	67.531.000,00			-	-	-		257.421.130,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	2	09	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
							Jumlah Paket Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.599.000,00	3.504.000,00	3.504.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			8.881.051,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	2	09	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	104.785.750,00	49.413.750,00	37.321.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			107.621.999,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	2	09	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	27.113.000,00	7.600.000,00	4.780.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.709.743,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	2	09	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	3.600.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			3.866.463,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	112.020.000,00	34.188.000,00	20.126.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			116.341.874,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	-			100 %	100 %	199.180.000,00	0,00	0,00			-	-	-		285.157.022,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	15 Unit	199.180.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			285.157.022,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	100 %	1.657.623.124,00	1.352.378.728,00	1.228.286.844,00			-	-	-		1.704.190.856,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	2		09	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	238.652.400,00	238.652.400,00	238.652.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			232.142.443,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	2		09	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.418.970.724,00	1.113.726.328,00	989.634.444,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.472.048.413,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	2		09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	-			100 %	100 %	218.770.000,00	160.070.000,00	172.190.000,00			-	-	-		358.904.433,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2		09	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan				3 Unit	3 Unit	155.510.000,00	150.580.000,00	165.260.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			112.750.359,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	2		09	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	24.450.000,00	7.990.000,00	5.430.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			22.339.564,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	2		09	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	38.810.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			223.814.510,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	

No	Kode		Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
145	2	09 03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan Energi				2,608.00 kkal per kapita per hari	2,608.00 kkal per kapita per hari	1.798.771.700,00	1.154.002.600,00	1.079.333.300,00							1.478.367.021,00	
	2	09 03	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Pangan utama Masyarakat (beras) (Kg/kapita/tahun)	-			152.6 Kg/kapita/tahun	152.6 Kg/kapita/tahun	171.471.100,00	83.606.000,00	83.606.000,00			-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan	-		190.150.732,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09 03	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)																	
				Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	171.471.100,00	83.606.000,00	83.606.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan			190.150.732,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09 03	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase penguatan cadangan pangan pemda (jumlah cad pangan pemda per 100 ton x 100%)	-			40 %	40 %	374.000.000,00	170.000.000,00	95.330.700,00			-	-	-		388.216.289,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09 03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																	
				Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				40 Ton	5.6 Ton	374.000.000,00	170.000.000,00	95.330.700,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			388.216.289,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09 03	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai	Cakupan peserta yang mengikuti LCM dan Demo Masak B2SA (kecamatan)	-			12 Kecamatan	12 Kecamatan	1.253.300.600,00	900.396.600,00	900.396.600,00			-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	-		900.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09 03	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sampel PSAT yang ditindaklanjuti ke Lab (Jumlah sampel yang diuji ke	-			45 %	45 %	95.926.950,00	75.960.700,00	55.434.200,00			-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	Terjaganya Keanekaragaman, Ketersediaan dan keamanan pangan		99.429.106,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	05	2.01	0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota					29 Dokumen	23 Dokumen	95.926.950,00	75.960.700,00	55.434.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.		99.429.106,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							5.719.226.868,00	3.252.066.805,00	3.230.828.553,00					9.860.889.999,00			
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							5.719.226.868,00	3.252.066.805,00	3.230.828.553,00					9.860.889.999,00			
148	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan produksi pertanian (komoditas palawija dan hortikultura)				4 95 % ekor	4 95 % ekor	2.515.330.000,00	1.970.631.149,00	2.008.666.047,00							6.124.241.704,00	
	3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah produksi pertanian (komoditas palawija dan hortikultura)	-			34947 Ton	34947 Ton	2.467.094.000,00	1.961.011.149,00	1.999.046.047,00			-	-	-		2.716.881.704,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian																	
						Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian					12 Laporan	12 Laporan	2.467.094.000,00	1.961.011.149,00	1.999.046.047,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.716.881.704,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan	Jumlah Produksi hewan ternak sapi (ekor)	-			15 Ekor	15 Ekor	48.236.000,00	9.620.000,00	9.620.000,00			-	-	-		3.407.360.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	02	2.05	0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak																	

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
												Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia				1 Laporan	1 Laporan	48.236.000,00	9.620.000,00	9.620.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			3.407.360.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
149	3	27	03				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah produksi karkas sapi dari RPH (Ton per tahun)				266 ton per tahun	266 ton per tahun	1.520.328.800,00	529.394.114,00	207.576.114,00							1.750.000.000,00	
	3	27	03	2.02			Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah RPH yang dipelihara	-			2 Unit	2 Unit	1.520.328.800,00	529.394.114,00	207.576.114,00			-	-	-		1.750.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	03	2.02	0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan																		
								Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi				2 Unit	2 Unit	1.520.328.800,00	529.394.114,00	207.576.114,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.750.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
150	3	27	04				PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Cakupan lokus atau lokasi surveillance hewan dan produk asal hewan (%)				90 %	90 %	1.080.402.068,00	752.041.542,00	741.896.392,00							1.136.648.295,00	
	3	27	04	2.01			Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit	Persentase jumlah sampel keswan dan kesmavet yang diuji (jumlah sampel yang diuji / jumlah	-			90 %	90 %	119.347.968,00	33.680.292,00	33.680.292,00			-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	-		124.204.937,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3	27	04	2.01	0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan																	
							Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan				6 Wilayah	6 Wilayah	119.347.968,00	33.680.292,00	33.680.292,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.			124.204.937,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah frekuensi layanan kesehatan hewan melalui pemeriksaan kesehatan hewan dan pemeriksaan laboratorium kesehatan hewan / produk asal hewan di UPTD. Puskeswan	-			1200 Kali	1200 Kali	900.380.100,00	718.361.250,00	708.216.100,00			-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	-		950.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	04	2.03	0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium																	
							Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium				12 Laporan	12 Laporan	500.361.800,00	420.058.300,00	420.058.300,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.			500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	04	2.03	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner																	
							Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				12 Laporan	12 Laporan	400.018.300,00	298.302.950,00	288.157.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.			450.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	-	-			-	-	60.674.000,00	0,00	0,00			-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	-		62.443.358,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	04	2.04	0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik				15 Unit Usaha	15 Unit Usaha	60.674.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.			62.443.358,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
151	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelompok Tani yang dibina/dikembangkan				10 %	10 %	603.166.000,00	0,00	272.690.000,00							850.000.000,00	
	3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelompok Tani yang dibina/dikembangkan	-			80 %	80 %	603.166.000,00	0,00	272.690.000,00			-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	-		850.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	07	2.01	0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa																	
							Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan				1 Unit	1 Unit	54.475.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.			250.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa																	
							Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				12 Unit	200 Unit	516.111.000,00	0,00	272.690.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.			500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	07	2.01	0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				15 Unit	15 Unit	32.580.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.			100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

BAB IV

PENUTUP

Uraian dan penjabaran yang telah tertuang didalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam dapat disampaikan sebagai berikut :

- Secara Umum

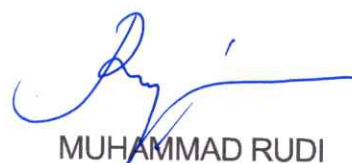
Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam Tahun 2024 disusun sebagai wujud dukungan sistem administrasi negara dibidang ketahanan pangan dan pertanian yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang semakin profesional, efisien, efektif serta tanggap terhadap aspirasi masyarakat.

- Secara Khusus

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam Tahun 2024 merupakan proses berkelanjutan yang artinya perlu dikaji secara cermat berkesinambungan, maka diambil langkah strategis sebagai berikut :

- a. Rancangan Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam Tahun 2024 merupakan pedoman pelaksanaan program pembangunan di bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian dan telah diupayakan disusun sebaik-baiknya, terukur dan akuntabel berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 selama dua triwulan.
- b. Melakukan pengembangan perencanaan program pembangunan strategis sesuai dengan perkembangan perubahan lingkungan strategis.

WALI KOTA BATAM


MUHAMMAD RUDI

